Suluh Pembangunan: Journal of Extension and Development ISSN (print) 2714-8351
Vol. 7 No. 02, Agustus 2025, Hal 148-161 ISSN (online) 2686-1488

Peran Pemangku Kepentingan *(Stakeholders)* dalam Pemberdayaan Petani Gurem di Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara

The Role of Stakeholders in Empowering Smallholder Farmers in Kotabumi Utara Subdistrict, North Lampung Regency

Oleh:
Salsabilla Noviya Romadhona[1*], Indah Listiana[1], Muhammad Ibnu[1], Sumaryo Gitosaputro[1]
[1]Program Studi Penyuluhan Pertanian, Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.
Jl. Sumantri Brojonegoro 1, Bandar Lampung, 35145, Lampung, Indonesia
[*]*email: salsabillanoviya29@gmail.com*

Received: March 26, 2025; Revised: July 21, 2025; Accepted: July 28, 2025

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran para pemangku kepentingan *(stakeholders)* dalam pemberdayaan petani gurem di Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian ini berjumlah 20 orang yang berdomisili di Kecamatan Kotabumi Utara dan memahami kegiatan pemberdayaan masyarakat, terdiri dari 3 orang pemerintah daerah, 4 pelaku UMKM, 5 akademisi, dan 8 petani. Penelitian berlangsung pada tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan petani gurem telah melibatkan berbagai *stakeholders,* seperti pemerintah desa, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, UMKM, dan kelompok tani. Pemberdayaan dilakukan melalui pelatihan, penyuluhan, penguatan kelembagaan, dan pengembangan usaha tani. Meskipun demikian, pelaksanaan pemberdayaan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan modal, kurangnya respons masyarakat, dan rendahnya tingkat pendidikan petani gurem. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang lebih kuat antar *stakeholder* untuk mendukung keberlanjutan pemberdayaan petani gurem.

Kata kunci: Pemberdayaan, Petani Gurem, Pemangku Kepentingan

ABSTRACT

The purpose of this study was to to analyze the role of stakeholders in empowering smallholder farmers in Kotabumi Utara District, North Lampung Regency. The research used a qualitative descriptive approach with data collected through observation, interviews, and documentation. The research involved 20 informants residing in Kotabumi Utara District who have a good understanding of community empowerment activities. They consisted of 3 local government officials, 4 MSME actors, 5 academics, and 8 farmers. The study was conducted in 2024. The findings indicate that the empowerment activities involve various stakeholders such as village governments, agricultural extension workers, universities, MSMEs, and farmer groups. Empowerment is carried out through training, counseling, institutional strengthening, and development of farming businesses. However, challenges remain, including limited capital, weak community response, and low education levels of smallholder farmers. Therefore, stronger synergy among stakeholders is needed to support sustainable empowerment of smallholder farmers.

Keywords: *Empowerment, Smallholder Farmers, Stakeholders*

ISSN (print) 2714-8351
ISSN (online) 2686-1488

PENDAHULUAN

Lahan pertanian seluas kurang dari setengah hektar dianggap kecil oleh petani kecil. Para wirausaha pertanian ini berkembang dengan laju yang mengkhawatirkan, namun tingkat kehidupan mereka sangat memprihatinkan. Hasil survei awal Sensus Pertanian (SP) menunjukkan bahwa rumah tangga petani kecil dengan luas lahan kurang dari 0,5 hektar, baik milik sendiri maupun sewa, hanya mencapai 51,9% dari total 20,8 juta rumah tangga petani pada tahun 1993, menunjukkan bahwa standar hidup petani rendah. Pada tahun 2003, 53,9% keluarga petani merupakan petani kecil, dan angka tersebut meningkat menjadi sekitar 55,1% pada tahun 2008. Menurut BPS Lampung Utara (2023) petani kecil menyumbang 62,05% dari total populasi petani di Indonesia, yang berjumlah 27.799.280 petani secara keseluruhan.

Petani Indonesia sebagaian besar adalah petani subsisten, dan tingkat kesejahteraan yang rendah mereka merupakan akibat langsung dari kekurangan lahan pertanian. Pemilik lahan memaksa petani subsisten untuk menyewa lebih banyak lahan agar dapat menggarap wilayah yang lebih luas, atau mereka beralih ke pekerjaan pertanian. Memperluas pertanian dengan menyewa lahan dari pemilik tanah atau mencari pekerjaan di luar pertanian merupakan hal yang esensial bagi petani kecil untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan produktivitas pertanian. Selain itu, banyak orang di daerah pedesaan beralih ke pekerjaan pertanian akibat berkurangnya luas lahan. Bekerja sebagai pekerja pertanian memungkinkan mereka tidak hanya mengolah lahan sendiri, tetapi juga menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Beberapa di antara mereka bekerja sebagai buruh tani dan tidak memiliki tanah; mereka bergantung sepenuhnya pada penghasilan dari pekerjaan pertanian. Mulai dari menanam benih hingga merawat tanaman yang sudah matang, seorang buruh tani melakukan segala hal dalam proses menanam padi. Petani dan buruh tani dalam komunitas pertanian membentuk hubungan melalui interaksi langsung, yang meliputi ikatan kerja yang didasarkan pada transaksi dan interaksi sosial. Dalam hal kemajuan suatu negara, sektor pertanian memegang peranan yang sangat penting (Borotoding, 2022).

Mempromosikan keadilan, meningkatkan ekspor dan pendapatan petani, menciptakan peluang kerja, serta memenuhi kebutuhan pangan dan industri dalam negeri merupakan tujuan dari pertumbuhan pertanian Indonesia. Inisiatif kebijakan harus memprioritaskan penguatan kemampuan komunitas pedesaan dalam membangun usaha yang kompetitif melalui pertanian jika kita ingin meningkatkan produktivitas dan daya saing (Borotoding, 2022).

Penduduk Indonesia bergantung pada pertanian untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sektor pertanian memainkan peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi negara. Meningkatkan pendapatan mayoritas penduduk melalui ketergantungan pada sektor pertanian adalah langkah yang harus ditempuh jika pemerintah serius dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu faktor terpenting yang menjamin kelangsungan pertanian dalam jangka panjang adalah petani. Oleh karena itu, mendukung pertumbuhan komoditas pertanian memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani melalui pengembangan komunitas pertanian atau keterlibatan komunitas pertanian (Saputra, 2018).

Salah satu taktik kunci dalam pembangunan adalah pemberdayaan masyarakat, menurut Mangowal (2013). Istilah “pemberdayaan” menggambarkan inisiatif yang bertujuan untuk memperkuat dan memberdayakan komunitas. Sebagai tulang punggung ekonomi, baik secara lokal maupun nasional, komunitas pertanian menjadi sasaran inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan nasional (Mutmainna et al., 2016)

Kondisi alam di Indonesia yang memiliki tanah subur menjadikan sektor pertanian dianggap sangat menguntungkan, sehingga tidak sedikit masyarakat memilih menjadi petani dan bergabung dalam kelompok tani. Pemanfaatan lahan kekayaan yang kurang baik dan benar, menyebabkan banyaknya jumlah petani gurem di Indonesia. Untuk menghitung jumlah petani kecil, kita perlu mengetahui berapa banyak orang yang tinggal di setiap rumah tangga dan berapa banyak di antaranya yang memiliki kurang dari setengah hektar lahan pertanian (tidak termasuk lahan yang digunakan untuk pertanian di area publik atau pesisir). Jumlah petani gurem di kabupaten Lampung Utara sebanyak 25.743 petani, dan diantaranya 2.616 petani berada di kecamatan Kotabumi Utara (Badan Pusat Statistik & Utara, 2023).

Berdasarkan hasil *survey* dilapangan, masalah-masalah yang dihadapi petani di Kecamatan Kotabumi Utara meliputi : Aspek budidaya yaitu keterbatasan lahan, keterbatasan modal dan sarana produksi, pada aspek sosial yaitu pendidikan yang kurang, pola pikir yang sulit berubah, karakter yang cenderung egois, konflik Agraria dan kepemilikan lahan, serta pada aspek individu yaitu kurang berani mengambil risiko, rendahnya kesadaran akan pendidikan dan pelatihan, budaya pasrah dan fatalistik, dan sistem warisan lahan yang menyusut.

Berangkat dari masalah-masalah yang dialami petani gurem di Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara tersebut, maka perlu adanya peran aktif dari *stakeholders* atau pemangku kepentingan setempat untuk turut mendukung dan menggerakkan secara konsisten pada kegiatan pemberdayaan masyarakat terkhusus petani gurem. Sehingga permasalahan tersebut menjadi permasalahan yang harus dipecahkan, maka dalam ini perlu dilakukan penelitian mengenai "Peran Pemangku Kepentingan *(Stakeholders)* Dalam Pemberdayaan Petani Gurem Di Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara".

METODE PENELITIAN

Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara merupakan tempat penelitian ini dilakukan. Lokasi penelitian ini dipilih dengan mempertimbangkan fakta berikut: ini adalah kecamatan yang memiliki jumlah petani gurem yang cukup banyak.

Untuk memahami lebih lanjut tentang pemberdayaan masyarakat dan orang-orang yang berperan di dalamnya, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Metode seperti dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data. Peneliti dapat secara bebas menggali informasi dari informan kunci menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur. Dengan menggunakan triangulasi sumber, bukti penelitian dikonfirmasi. Dalam triangulasi sumber, peneliti membandingkan data dari wawancara dengan data dari observasi dan mengajukan pertanyaan yang sama dari berbagai sumber. Informan penelitian ini berjumlah 20 orang yang berdomisili di Kecamatan Kotabumi Utara dan memahami kegiatan pemberdayaan masyarakat, terdiri dari 3 orang pemerintah daerah, 4 pelaku UMKM, 5 akademisi, dan 8 petani. Penelitian berlangsung pada tahun 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, yaitu berdomisili di Kecamatan Kotabumi Utara dan memiliki pemahaman yang memadai terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemilihan ini dilakukan agar data yang diperoleh benar-benar relevan dengan konteks penelitian. Total terdapat 20 informan yang terlibat, meliputi 3 orang dari unsur pemerintah daerah yang berperan dalam kebijakan dan pelaksanaan program, 4 pelaku UMKM atau bisnis yang mewakili sektor ekonomi lokal, 5 akademisi dari

perguruan tinggi yang memiliki keahlian dalam bidang pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, serta 8 petani yang menjadi bagian langsung dari sasaran kegiatan pemberdayaan. Seluruh data yang dikumpulkan bersumber dari data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi lapangan selama tahun 2024.

Peran Pemangku Kepentingan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Petani Gurem Di Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara

Pemerintah Daerah

Pemerintah memiliki beberapa peran dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Dari 3 informan pemerintah daerah yang terjun langsung pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu Koordinator penyuluh lapangan kecamatan Kotabumi Utara, Kepala Desa Wonomarto, dan Ketua Bidang Penyuluhan Pertanian Dinas pertanian Kabupaten Lampung Utara. Peran pemerintah dalam kegiatan pemberdayaan berjalan secara umum dengan objeknya seluruh petani, sehingga tidak ada yang khusus dilakukan untuk petani gurem.

Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Dari 3 informan pemerintah daerah dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak ada yang membuat kebijakan atau menerbitkan peraturan-peraturan, tetapi para informan tersebut tetap bertanggung jawab menjalankan tugas sesuai aturan dari pemerintah pusat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa peran pemerintah daerah sebagai regulator dalam kegiatan pemberdayaan petani gurem tidak ada di Kecamatan Kotabumi Utara. Berikut adalah jawaban informan:

"Kita tidak membuat kebijakan atau peraturan, hanya menjalani dan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh pusat, tugas kita menjalankan itu, dan membuat programa penyuluhan untuk acuan dasar kegiatan"

Berdasarkan hasil wawancara pemerintah daerah di Kecamatan Kotabumi Utara mengungkapkan bahwa mereka sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan peraturan yang sudah ada dari pemerintah pusat, bukan pengatur atau pembuat kebijakan-kebijakan. Penelitian Sagala dan Noerfitri (2021) yang menjelaskan bahwa dalam praktik pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah sering kali berperan sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, bukan sebagai pembuat regulasi baru. Hal ini terjadi karena kewenangan pembuatan kebijakan strategis lebih banyak berada di tingkat pusat, sementara pemerintah daerah hanya bertanggung jawab untuk mengimplementasikan program dan memastikan kebijakan berjalan sesuai ketentuan. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Suharma dan Novita (2017) yang menyatakan bahwa peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat cenderung bersifat administratif dan operasional, di mana tugas utamanya adalah melaksanakan kebijakan yang sudah ada serta menyusun programa kegiatan sebagai acuan pelaksanaan di lapangan.

Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator dalam kegiatan pemberdayaan petani di Kecamatan Kotabumi Utara berjalan secara umum untuk seluruh petani atau tidak ada yang terkhusus petani gurem, dan hanya dilakukan melalui kelompok tani, sehingga petani yang tidak termasuk anggota kelompok tani cenderung tidak dapat bimbingan dan arahan dari pemerintah dalam usahataninya. Berikut dibuktikan dengan jawaban Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Utara:

"Kita hanya fokus membina petani yang termasuk dalam kelompok tani, dan petani secara umum, tidak ada khusus petani gurem"

Berdasarkan jawaban dari informan, dapat disimpulkan bahwa fokus pemerintah

daerah dalam pemberdayaan masyarakat hanya yang termasuk anggota kelompok tani dan petani secara keseluruhan tanpa ada yang dikhususkan petani gurem. Pemerintah, dalam perannya sebagai katalisator, telah secara aktif membimbing dan membantu petani untuk meningkatkan kualitas dan inovasi mereka. Namun, kemajuan dalam manajemen dan penggunaan teknologi belum terlihat. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Labolo Muhadam (2014) tentang tanggung jawab pemerintah sebagai dinamisator: yaitu, untuk memfasilitasi dan mempertahankan dinamika pembangunan regional dengan mendorong partisipasi masyarakat ketika tantangan pembangunan muncul.

Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Dari 3 informan pemerintah daerah perannya sebagai fasilitator cenderung sudah dijalankan sesuai program pemerintah. Program yang dimaksud adalah program Pompanisasi yaitu pompa air yang diberikan ke kelompok tani untuk mengaliri tanamanya, dari pihak kepala desa yang memfasilitasi lahan balai Desa untuk dimanfaatkan masyarakat ditanami sayuran dan buah-buah, serta adanya bantuan pemberian pupuk dan bibit yang bersubsidi melalui kelompok tani, tetapi dalam keterlaksanaannya belum berjalan dengan baik karena program dan kegiatannya yang hanya berjalan beberapa kali, sehingga tidak rutin dan tidak terlalu dirasakan oleh petani.

Selain memfasilitasi sarana dan prasarana, pemerintah berperan sebagai perantara atau menjembatani kepentingan usahatani. Di Kecamatan Kotabumi Utara pemerintah daerah terutama penyuluh pertanian yang terjun langsung sebagai penjembatan antara petani dengan pihak perusahan jagung sebagai mitra penanaman jagung dengan menjalin kerjasama pinjaman modal berupa bibit siap tanam dan menampung hasil panen petani, tetapi pada keterlaksanaanya tidak berjalan dengan baik dan sulit mencari perusahan yang mau bekerjasama. Berikut dibuktikan dengan jawaban dari Penyuluh pertanian:

"kita pernah menjembatani antara petani dengan pihak perusahan yang mau menjadi mitra penanaman jagung dengan memberi modal dan menerima hasil panen, tetapi tidak berjalan dengan baik, dan sekarang susah menjalin kerja sama dengan perusahan."

Tanggapan para informan membuat kami percaya bahwa pemerintah daerah tidak melakukan tugasnya dengan baik dalam memediasi antara petani dan industri pertanian, namun pemerintah daerah melakukan tugasnya dengan baik dalam menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang dapat dirasakan langsung oleh petani. Pemerintah telah berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan infrastruktur pertanian bagi petani; namun, hal ini mungkin akan lebih baik jika pelatihan teknis dan keterampilan juga disediakan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Labolo Muhadam (2014) tentang tugas pemerintah sebagai fasilitator: memastikan pertumbuhan dapat terjadi dengan mengumpulkan kepentingan berbagai pihak dalam masyarakat untuk memaksimalkan pembangunan regional.

Peran Pemerintah Sebagai Katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator dalam kegiatan pemberdayaan petani di Kecamatan Kotabumi Utara berjalan secara umum untuk seluruh petani atau tidak ada yang terkhusus petani gurem. Berikut dibuktikan dengan jawaban dari Kabid Penyuluhan Pertanian Kabupaten Lampung Utara:

"Melalui program-program yang ada untuk dilakukan pertemuan dengan ketua atau perwakilan kelompok tani dalam berpatisipasi kegiatan tersebut, dan nanti tugas nya mereka yaitu menyebarkan ke anggota kelompoknya yang lain sehingga itu lah yang kita bina lebih lanjut.

Berdasarkan jawaban dari informan, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah sebagai pendorong perubahan dan percepatan inovasi kepada petani berjalan cukup baik, tetapi kegiatan-kegiatannya hanya dilakukan disaat ada program saja atau tidak rutin dilakukan, sehingga dampaknya kurang berkelanjutan dan tidak optimal

dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Listiana (2017) menunjukkan bahwa kapasitas petani dalam menerapkan teknologi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) masih tergolong rendah, terutama akibat keterbatasan pemahaman dan pendampingan yang berkelanjutan. Ketidak konsistennan dalam pendampingan dan sosialisasi inovasi menyebabkan petani kesulitan dalam menerapkan teknologi baru secara berkelanjutan. Akibatnya, setelah program selesai, banyak petani kembali ke cara tradisional karena kurangnya dukungan dan monitoring lanjutan.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (2015), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi yang sangat strategis dalam struktur perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya berfungsi sebagai pemain utama dalam aktivitas ekonomi nasional, tetapi juga menjadi tulang punggung dalam penyerapan tenaga kerja dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sektor ini berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi rakyat karena mampu menjangkau lapisan masyarakat menengah ke bawah yang seringkali tidak tersentuh oleh sektor usaha besar. Selain itu, UMKM berkontribusi dalam penciptaan pasar baru melalui inovasi produk dan adaptasi terhadap kebutuhan lokal, serta berperan dalam peningkatan nilai ekspor nasional dengan produk-produk unggulan berbasis sumber daya lokal. Dengan kata lain, keberadaan UMKM bukan hanya sebagai penggerak ekonomi domestik, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan ekonomi bangsa.

Peran UMKM sebagai Pemain Utama Kegiatan Ekonomi Di Berbagai Sektor

Peran UMKM sebagai pemain utama kegiatan ekonomi di berbagai sektor cukup baik terhadap pemberdayaan masyarakat, ada beberapa anggota kelompok UMKM memiliki jenis usaha seperti perdagangan, jasa dan industri kreatif. Ada 4 diantara 8 desa yang ada di Kecamatan Kotabumi Utara yang kelompok UMKM dari petani gurem. Desa Sawojajar merupakan salah satu desa di Kecamatan Kotabumi Utara dengan kelompok UMKM terbanyak dan aktif dibandingkan dengan desa lainnya. Di desa Sawojajar anggota UMKM yang terdaftar ada 37 usaha dari berbagai jenis produk olahan makanan, jasa dan industri kreatif. Berikut dibuktikan dengan pernyataan dari ketua UMKM :

"Anggota kelompok UMKM desa ini dari berbagai jenis usaha, dari berdagang sampai usaha di bidang jasa yaitu tukang cukur rambut, dan kerajinan rajut".

Berdasarkan jawaban dari informan, dapat disimpulkan bahwa peran UMKM sebagai pemain utama kegiatan ekonomi di berbagai sektor cukup baik, tetapi ada beberapa usaha yang tidak berjalan kembali sampai saat ini. Jenis usaha didominasi oleh olahan makanan sebanyak 34 usaha dengan persentase sebesar 91,8 persen. Wilayah penelitian yang berada di daerah pedesaan memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM berbasis kuliner, didukung dengan ketersedian bahan baku lokal yang dapat menjadi modal utama dalam usaha olahan makanan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Komalasari (2023) yang menyebutkan bahwa Potensi sumber daya lokal di daerah pedesaan merupakan faktor penting dalam pengembangan UMKM sektor kuliner.

Peran UMKM sebagai Penyedia Lapangan Kerja

Dari 4 informan UMKM berperan sebagai penyedia lapangan kerja dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat belum baik, karena usaha yang dimiliki masih skala kecil, sehingga tidak memerlukan tenaga dalam proses produksinya. Peran UMKM sebagai penyedia lapangan kerja masih belum berjalan dengan baik karena skala usaha yang dimiliki masih tergolong kecil. Selain itu proses produksi yang tidak berjalan setiap hari karena menyesuaikan ketersediaan bahan baku lokal yang merupakan buah musiman, maka kegiatan

produksi cenderung dilakukan sendiri dengan proses bertahap setiap harinya dan jumlah yang tidak terlalu banyak setiap sekali produksi. Berikut dibuktikan dengan jawaban dari UMKM desa Wonomarto.

"Usaha saya ini masih kecil, dan tidak tiap hari buat kalo ada bahan bakunya saja, untuk produksi yang masak saya sendiri, dan untuk membantu proses pengolahan bahan baku dan pengemasan mengajak 2 orang tetangga"

Berdasarkan jawaban dari informan, dapat disimpulkan bahwa peran UMKM sebagai penyedia lapangan kerja belum sepenuhnya optimal. Sebagian besar pelaku UMKM masih menjalankan usaha secara mandiri, dan jika pun melibatkan tenaga kerja, biasanya hanya mempekerjakan 1 hingga 2 orang tetangga sekitar untuk membantu dalam pengolahan bahan baku dan proses pengemasan produk. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi UMKM dalam menciptakan lapangan kerja di tingkat lokal masih bersifat terbatas dan informal, meskipun tetap memberikan dampak ekonomi bagi lingkungan sekitar pelaku usaha.

Peran UMKM sebagai Pemberdayaan Masyarakat

Dari 4 informan UMKM berperan sebagai pemberdayaan masyarakat yang sudah mereka lakukan yaitu membina anggota kelompok UMKM agar selalu konsisten berkembang kedepannya, serta pada kelompok UMKM Desa Sawojajar melakukan sosialisasi kepada siswa-siswi SMAN2 Kotabumi dalam rangka memberikan motivasi dan menumbuhkan jiwa wirausaha kepada anak muda sejak dini. Hal ini sejalan dengan penelitian Saifudin, Habibi & Tauhid (2024) bahwa sosialisasi dan pelatihan rutin dalam tahap awal pemberdayaan di Sidoarjo berhasil menarik tanggapan positif para pemuda.

Peran UMKM sebagai Pencipta Pasar Baru

Peran UMKM sebagai pencipta pasar baru dengan menghadirkan inovasi produk, serta memanfaatkan perkembangan teknologi dan tren pasar. UMKM rata-rata lebih fleksibel dan cepat beradaptasi dibandingkan perusahaan besar, sehingga mampu membuka peluang usaha di berbagai sektor. Kelompok UMKM di Desa Sawojajar sudah memiliki Kios "Dapor Mak" sebagai tempat pemasaran produk hasil olahan dari masing-masing UMKM, selain itu juga rata-rata pelaku UMKM mempromosikan produk nya melalui status media sosial dan whatshapp group. Berikut dibuktikan dengan jawaban informan:

"Sejauh ini kita sudah membuat Namanya "Dapoer Mak" yaitu kios yang dikelola anggota kelompok UMKM kami, sebagai tempat pemasaran produk hasil olahan kami setiap hari nya, dan selebihnya pemasaran lewat online seperti status media social dan whatshapp group."

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran Umkm sebagai pencipta pasar baru sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik yaitu dengan adanya "Dapoer Mak" sebagai kios tetap untuk memasarkan produk, dan promosi secara online dengan memanfaatkan teknologi sehingga menjadi lebih mudah dalam pemasaran produk usaha nya. Hal ini sejalan dengan penelitian Hal ini sejalan dengan penelitian Prihantara (2023) implementasi aplikasi "Pasar Online" dapat mempermudah transaksi dan memperluas jangkauan pasar pedagang.

Peran UMKM sebagai Penyumbang Kegiatan Ekspor

Peran UMKM sebagai penyumbang kegiatan ekspor di Kecamatan Kotabumi Utara terutama desa Sawojajar cenderung usaha berskala kecil, sehingga tidak mampu menembus pasar internasional. Produk UMKM ini belum memiliki standar internasional seperti regulasi bea cukai, disamping itu produk umkm ini hanya memiliki sertifikasi produk halal. Sertifikat halal yang dimiliki produk UMKM ini merupakan bantuan dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara dengan pendampingan sebagai konsultasi terkait kebersihan dan kelayakan makanan yang akan dijual. Kapasitas produksi yang terbatas dan modal yang kecil, menjadi salah satu faktor produk UMKM sulit untuk

memenuhi standar ekspor. Berikut dibuktikan dengan pernyataan informan:

"Produk saya ini belum sampai ekspor keluar negeri, tetapi baru sampai keluar pulau sebagai oleh-oleh"

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran UMKM sebagai penyumbang kegiatan ekspor tidak berjalan, karena usaha yang dimiliki UMKM di Kecamatan Kotabumi Utara terutama desa Sawojajar masih berskala kecil, sehingga hanya sebagai oleh-oleh yang terbatas luar pulau.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi salah satu *stakeholder* yang dapat mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat. Menurut Mardikanto dan Soebiato (2015) LSM memiliki peranan dalam proses pemberdayaan masyarakat, sebagai Fasilitator, pelatih atau pendidik, pemupukan modal, penyelenggarakan proyek-proyek stimulant, serta Agent advocacy. Peran LSM menjadi aktor kunci dalam mendoorng perubahan sosial dan masyarakat. Pada penelitian ini kenyataannya di Kecamatan Kotabumi Utara tidak ada LSM yang benar-benar berperan aktif dan memberikan manfaat untuk masyarakat dan lingkungan sekitar. Informasi ini peneliti dapatkan dari berbagai *stakeholder* dan elemen masyarakat lainnya yang menyatakan hanya ada oknum-oknum yang mengaku sebagai wartawan, tetapi hanya datang saat ada bantuan dana daerah turun, serta membuat berita yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi sebenarnya. Peneliti sudah menghubungi pihak tersebut untuk melakukan wawancara untuk menggali informasi, tetapi tidak mendapatkan tanggapan.

Perguruan Tinggi

Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO) merupakan satu-satunya perguruan tinggi berbentuk universitas yang beroperasi di Kabupaten Lampung Utara, sekaligus menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah tersebut. Sebagai institusi pendidikan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, UMKO memiliki sejumlah desa binaan yang dijadikan laboratorium sosial untuk menerapkan konsep tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Dua di antaranya adalah Desa Wonomarto dan Desa Sawojajar yang berlokasi di Kecamatan Kotabumi Utara. Melalui program desa binaan ini, UMKO berperan aktif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat setempat melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan kewirausahaan, penguatan pendidikan nonformal, pendampingan UMKM, serta pengembangan potensi lokal berbasis kearifan daerah. Keterlibatan UMKO dalam kegiatan tersebut mencerminkan komitmen universitas dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal melalui kolaborasi antara dunia akademik, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Peran Dosen Pada Pengabdian Masyarakat

Dari 3 informan dari pihak dosen UMKO yang berpartisipasi aktif atau turun langsung dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu Dekan Fakultas Pertanian dan Peternakan, Ketua Program Studi Agribisnis, dan Ketua Program Studi Agroteknologi. Peran Dosen dalam penerapan hasil penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang dilaksanakan melalui kegiatan:

Penerapan Hasil penelitian berupa karya cipta kreasi dan inovasi dosen sesuai bidang ilmu keahlian program studi. Dari 3 informan cenderung mengatakan sudah menjalankan peran tersebut, seperti memberikan biang EM4 hasil penelitian dari laboratorium agroteknologi sebagai campuran pembuatan pupuk petani, dan selalu meneliti perkembangan pertumbuhan yang di tanam petani. Berikut dibuktikan dari pernyaataan informan:

"memberikan biang EM4 hasil penelitian untuk campuran pembuatan pupuk petani, dan selama proses budidaya tanaman

Padi, jagung dan singkong juga saya selalu meneliti perkembangannya dalam rangka Uji Mutilokasi"

Hal tersebut dapat diartikan bahwa peran dosen pada menerapkan hasil penelitian dalam kegiatan pengabdian masyarakat sudah cukup baik, tetapi hal tersebut dilakukan secara umum kepada seluruh petani tidak ada terkhusus petani gurem.

Pelatihan pemanfaatan teknologi dan sosialisasi ilmu pengetahuan. Dari pernyataan informan sebagai dosen Agribisnis menyatakan bahwa sudah melakukan pelatihan pembukuan BUMDES kepada masyarakat desa Sawojajar dengan menggunakan komputer dan Handphone sebagai pemanfaatan teknologi. Berikut dibuktikan dari pernyaataan informan:

"kami melakukan pelatihan pembukuan keuangan Bumdes dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi seperti komputer dan Handphone"

Hal tersebut dapat diartikan bahwa peran dosen pada pelatihan pemanfaatan teknologi dan sosialisasi ilmu pengetahuan dalam kegiatan pengabdian masyarakat sudah cukup baik.

Pendampingan dan pengembangan usaha masyarakat yang sudah ada. Dari 3 informan cenderung mengatakan sudah menjalankan peran tersebut. Pendampingan selama proses budidaya tanaman selalu diperhatikan perkembangannya dalam rangka Uji Mutilokassi, mendampingi dan melakukan monitoring secara rutin ke petani binaan, dan hanya dilakukan melalui kelompok tani atau kelompok UMKM, sehingga masyarakat yang tidak termasuk anggota kelompok cenderung tidak dapat pendampingan.

Menciptakan masyarakat yang mandiri, punya usaha, berketerampilan dan berpenghasilan. Dari 3 informan pihak dosen cenderung sudah melaksanakan perannya terhadap pengabdian masyarakat.

Menciptakan masyarakat yang mandiri melalui pelatihan rutin dalam pembuatan pupuk organik, penerapan pestisida nabati, dan pembuatan laporan keuangan bumbess serta mendorong keberjalanan UMKM yang di lakukan oleh civitas akademik kepada masyarakat. Bimbingan dan pendampingan yang berkelanjutan, diharapkan masyarakat dapat mengadopsi teknologi ramah lingkungan ini secara luas, sehingga meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Peran Mahasiswa Pada Pengabdian Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan para dosen, mereka mengatakan bahwa kegiatan pengabdian atau pemberdayaan masyarakat selalu mengajak mahasiwa untuk ikut terlibat dalam kegiatan bermasyarakat. Pengabdian masyarakat menjadi kegiatan pembelajaraan mahasiswa untuk meningkatkan empati dan rasa tangung jawab terhadap keberlangsungan masyarakat. Berikut dibuktikan dengan jawaban dari Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kotabumi:

"Selama ini kita mengikuti kegiatan pengabdian ke masyarakat dengan belajar dan memahami kondisi lingkungan sekitar untuk bagaimana cara maju lebih baik lagi kedepannya."

Mahasiswa memiliki peran dalam upaya mensejahterkan masyarakat Indonesia yaitu sebagai agen perubahan, pengontrol sosial, dan kekuatan moral. Pihak mahasiswa rata-rata mengatakan bahwa peran mereka sebagai mahasiswa kepada masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan baik, tetapi selalu mengusahakan dan belajar terus untuk lebih baik kedepannya. Hal tersebut dibuktikan pula dari analisis perbandingan antara data hasil wawancara, dengan peranan ideal yang dilakukan atas dasar nilai-nilai yang seharusnya dilakukan berjalan dengan kurang baik. Dengan demikian, meskipun peran mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya optimal, semangat untuk terus belajar dan berusaha menjadi indikasi positif bahwa mereka memiliki potensi untuk memberikan dampak yang lebih besar di masa depan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Zubaidi dan Giyarsih (2019),

yang menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa memiliki potensi besar dalam pemberdayaan masyarakat, implementasinya seringkali belum maksimal. Penelitian tersebut menyoroti pentingnya peran mahasiswa dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk memberdayakan masyarakat di kawasan tertinggal, namun juga mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan sumber daya dan koordinasi yang perlu ditingkatkan.

Kelompok Tani

Dalam pertumbuhan pertanian, pemberdayaan masyarakat merupakan kunci, dan organisasi petani dapat membantu mewujudkan hal ini. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor: 273/Kpts/OT.160/4/. "Kelompok Tani berperan dan berfungsi sebagai kelas belajar, unit produksi usaha tani, dan wahana kerja sama antara anggota kelompok". Dari 8 informan petani yang mewakili masing-masing desa di Kecamatan Kotabumi Utara dan terlibat langsung dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu kelompok wanita tani (KWT) Desa Talangjali, Kelompok wanita tani (KWT) Desa Banjar Wangi, Kelompok Tani Desa Wonomarto, Kelompok Tani Desa Margorejo, Kelompok Tani Desa Kalicinta, Kelompok Tani Desa Sawojajar, Kelompok Tani Desa Madukoro Baru, dan Kelompok Tani Desa Madukoro. Peran kelompok tani dalam kegiatan pemberdayaan berjalan menyeluruh dan menyasar seluruh petani tanpa ada perlakuan khusus terhadap petani gurem. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan masih bersifat umum dan belum memiliki segmentasi khusus terhadap kelompok petani yang tergolong rentan secara ekonomi, seperti petani gurem.

Peran Kelompok Tani Sebagai Kelas Belajar

Dari 8 informan dari pihak kelompok tani sebagai kelas belajar dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat cenderung mengatakan sudah menjalani dan merasakan dampak yang baik antar anggota. Adanya kegiatan belajar bersama setiap kumpul kelompok, diskusi saling berbagi pengalaman, dan mendapatkan pengetahuan baru terutama dari penyuluh lapangan (ppl) memberikan dampak lebih baik kedepannya. Berikut adalah jawaban informan:

"Kumpulan kelompok pasti sambil belajar dan kadang praktek langsung pengetahuan baru terutama dari penyuluh yaitu pembuatan pupuk dari cucian beras, dan sampah dapur."

Pengetahuan, keterampilan, dan sikap (PK) dalam pertanian meningkat secara signifikan ketika kelompok tani berperan sebagai kelas belajar bagi para petani. Hal ini sejalan dengan temuan dari sebuah studi yang menunjukkan bahwa kelompok tani sebagai komunitas belajar membantu petani meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap (KSA) mereka. Mereka juga membantu petani menjadi lebih mandiri dalam kegiatan pertanian mereka, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan (Borotoding, 2022).

Peran Kelompok Tani Sebagai Unit Produksi Usahatani

Dari 8 informan dari pihak kelompok tani sebagai unit produksi usahatani dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat mengatakan berbagai kemampuan yang sudah dimiliki setiap kelompoknya.

Peran kelompok tani sebagai unit produksi usaha tani berjalan dengan baik. Kelompok Wanita Tani Sekar Sari sudah berhasil mengelola administrasi kelompok, kelompok ini miliki 2 lahan yang di garap bersama. Lahan pertama ditanami sayuran, mulai dari pengelolaan lahan, merawat budidaya tanamannya sampai setelah panen hasilnya dibagi rata ke semua anggota, dan sebagian disimpan sebagai kas kelompok. Lahan kedua ditanami ubi kayu (singkong) konsumsi. Proses penanaman, perawatan, hingga panen dilakukan secara gotong royong oleh seluruh anggota kelompok. Saat masa panen tiba, hasil panen tersebut diolah menjadi tape singkong yang kemudian dijual. Pendapatan dari hasil penjualan tersebut dikelola dalam bentuk simpan pinjam oleh

kelompok. Berikut dibuktikan dengan jawaban dari Ketua KWT Sekar Sari Desa Talangjali:

"Kita sudah memiliki produk tape hasil olahan singkong, serta sayuran hasil panen dari lahan bersama, dan dijual sehingga hasil keuntungannya masuk ke dalam kas kelompok, dan dikelola menjadi simpan pinjam kelompok"

Berdasarkan jawaban dari informan, dapat disimpulkan bahwa Kelompok tani ini berhasil sebagai unit produksi, sekaligus sebagai lembaga ekonomi berbasis komunitas. Keberhasilan ini tidak hanya memperkuat kemandirian kelompok, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian para anggotanya. Hal ini sejalan dengan temuan Bachiar et al., (2023) yang menunjukkan bahwa sistem simpan pinjam berbasis kelompok tani dapat meningkatkan kesejahteraan anggota melalui prinsip kekeluargaan dan gotong royong.

Peran Kelompok Tani Sebagai Wahana Kerjasama

Dari 8 informan dari pihak kelompok tani sebagai wahana kerja sama dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat cenderung mengatakan belum berjalan baik. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa belum semua petani memahami kerja sama dengan baik, sehingga terkadang ada ketimpangan peran aktif dalam bekerjasama dalam kelompok tani. Berikut adalah jawaban informan:

"Sebagian anggota baik mau berpartisipasi, tetapi ada beberapa anggota yang susah diajak kerjasama hanya ingin hasilnya saja."

Berdasarkan jawaban dari informan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani di Kecamatan Kotabumi Utara belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman sebagian petani terhadap makna dan pentingnya kerja sama dalam kelompok. Akibatnya, terjadi ketimpangan peran aktif antar anggota dalam menjalankan kegiatan kelompok, yang berdampak pada efektivitas program pemberdayaan itu sendiri. Diperlukan upaya pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan kelompok tani agar tercipta partisipasi yang lebih merata dan sinergis antar petani. Hal ini sejalan dengan temuan Sari et al (2022) yang mengungkapkan bahwa keberhasilan program simpan pinjam dalam kelompok tani sangat bergantung pada kekompakan dan partisipasi aktif anggota. Ketidakseimbangan peran seringkali menjadi kendala utama dalam menjalankan kegiatan secara kolektif.

Keterkaitan Pemangku Kepentingan *(Stakeholders)* Dalam Kegiatan Pemberdayaan Petani Gurem Di Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara

Pemberdayaan petani gurem di Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara memerlukan keterlibatan berbagai *stakeholders* atau pemangku kepentingan agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. *Stakeholders* yang berperan dalam kegiatan ini mencakup pemerintah, akademisi perguruan tinggi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan kelompok tani.

Keterkaitan Pemerintah Daerah Dengan Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

Berdasarkan hasil penelitian, keterkaitan atau keterlibatan pemerintah daerah dengan pihak ketiga dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di kecamatan kotabumi utara cenderung lebih banyak bekerjasama dengan perguruan tinggi yaitu Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

Keterkaitan Perguruan Tinggi Dengan Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

Keterkaitan atau keterlibatan Perguruan Tinggi dengan pihak ketiga dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di kecamatan kotabumi utara bekerjasama langsung dari Dinas Petanian Kabupaten Lampung Utara. Bentuk kerjasama yang dilakukan antara perguruan tinggi dengan pemerintah merupakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yaitu

sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, serta beasiswa untuk anak petani atau penyuluh untuk kuliah di sana. Bentuk kerjasama yang dilakukan antara perguruan tinggi dengan kelompok tani merupakan kegiatan pengabdian, bantuan bibit unggul, pupuk organik, dan pestisida nabati, serta menjadi tempat uji multilokasi bagi dosen.

Keterkaitan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dengan Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

Keterkaitan atau keterlibatan UMKM dengan pihak ketiga dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di kecamatan kotabumi utara cenderung lebih banyak bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan dalam hal pelatihan-pelatihan, Dinas Kesehatan dalam hal konsultasi kelayakan makanan serta sertifikasi halal, dan perguruan tinggi yaitu Universitas Muhammadiyah Kotabumi terkait pengelolaan agribisnis.

Keterkaitan Kelompok Tani Dengan Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

Keterkaitan atau keterlibatan Kelompok tani dengan pihak ketiga dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di kecamatan kotabumi utara cenderung bekerjasama langsung dengan penyuluh pertanian, pemerintah desa terkait sarana prasarana usahatani anggota kelompok, dan kerjasama dengan perguruan tinggi yaitu dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat dengan pemberian bantuan bibit dan pupuk dari perguruan tinggi kepada petani, dan usahatani menjadi tempat penelitian secara tidak langsung, sehingga semua pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada yang dirugikan.

Kendala Pemberdayaan Petani Gurem di Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing *stakeholder* memiliki kendala yang berbeda dalam menjalani peran.

Kendala Pada Pemerintah Daerah

Kendala pada peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kotabumi Utara, yaitu: Kendala teknis yang di hadapi terkait menghadapi perubahan cuaca sehingga sering ada hama penyakit yang menyerang tanamanan. Kendala sosial yaitu kelompok tani yang malas, pengetahuan sikap keterampilannya yang masih kurang, dan sifatnya dinamis. Kendala ekonomi yaitu masih rendahnya modal petani sendiri, apalagi petani yang ikut simpan pinjam dari bank harian keliling sehingga terlilit dengan bunga, dan mengakibatkan hasil dari jual

Kendala Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Peran UMKM dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kotabumi Utara hanya memiliki kendala dari bahan baku yang sulit di dapatkan karena bersifat tanaman musima, sehingga tidak dapat berproduksi setiap hari.

Kendala Pada Perguruan Tinggi

Peran Perguruan Tinggi dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kotabumi Utara memiliki kendala yaitu kendala dari prasarana transportasi yaitu akses ke Lokasi desa yang jalannya rusak, sehingga perjalanan memerlukan waktu dan tenaga yang lebih.

Kendala Pada Kelompok Tani

Peran Kelompok tani dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kotabumi Utara memiliki kendala, yaitu: Respon anggota kelompok yang kurang aktif, kurangnya kesadaran dan partisipasi anggota, terbatasnya akses terhadap penyuluhan.

SIMPULAN

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan

ISSN (print) 2714-8351
ISSN (online) 2686-1488

oleh pemangku kepentingan *(stekholders)* di Kecamatan Kotabumi Utara, tidak terdapat program khusus yang secara spesifik ditujukan bagi petani gurem. Meskipun pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan *(stekholders)* belum berjalan secara optimal, upaya perbaikan terus dilakukan demi menghasilkan dampak yang lebih baik bagi masyarakat di masa yang akan datang. Kegiatan pemberdayaan ini mendorong agar masing-masing pemangku kepentingan *(stekholders)* saling terhubung dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama yang berkelanjutan.

Kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kotabumi Utara secara keseluruhan mencakup beberapa aspek, yaitu kendala Pada kendala teknis yaitu menghadapi perubahan cuaca sehingga sering ada hama penyakit yang menyerang tanamanan, kendala sosial yaitu anggota kelompok tani pengetahuan sikap keterampilannya yang masih kurang, dan pada kendala ekonomi yaitu masih rendahnya modal petani sendiri, serta masalah terkait bahan baku untuk UMKM. Di samping itu, terbatasnya prasarana transportasi yang disediakan oleh perguruan tinggi menjadi salah satu tantangan yang dihadapi.

Disarankan agar para pemangku kepentingan di Kecamatan Kotabumi Utara memperkuat koordinasi lintas sektor dalam merancang program pemberdayaan yang lebih terarah bagi petani gurem. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi kebijakan pendukung, sementara perguruan tinggi berperan aktif dalam pendampingan teknis dan riset terapan. Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan berkelanjutan serta perluasan akses modal dan bahan baku bagi UMKM juga penting dilakukan agar kegiatan pemberdayaan berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Bachiar, M. D., Sakdiyah, H., & Ningsih, K. (2023). Sistem Simpan Pinjam pada Kelompok Tani Harapan Jaya Panaguen Kabupaten Pamekasan. *Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 23-29.https://doi.org/10.58906/melati.v40i1.95.

Badan Pusat Statistik, & Utara, L. (2023). *Kecamatan Kotabumi Utara Dalam Angka 2023.* Badan Pusat Statistik, 113.

Borotoding, H. (2022). *Peran Kelompok Tani Dalam Peningkatan Pendapatan.* Universitas Bosowa Makassar.https://doi.org/https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/2525.

Komalasari, N. D., Puspaningtyas, A., & Widodo, J. (2022). Pengembangan UMKM sentra kuliner Desa Pekarungan melalui fasilitasi pihak eksternal dan potensi ekonomi lokal. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 35–50. https://doi.org/10.30737/mediasosian.v6i1.2314.

Labolo Muhadam. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya.* Raja Grafindo Persada, 248.

Listiana, I. (2017). Kapasitas petani dalam penerapan teknologi pengendalian hama terpadu (PHT) padi sawah di Kelurahan Situgede Kota Bogor. *Agrica Ekstensia*, 46–52. http:// repository.lppm.unila. ac.id/41886.

Mangowal, J. (2013). Pemberdayaan masyarakat petani dalam meningkatkan pengembangan ekonomi pedesaan di Desa Tumani, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan. Governance. *https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/1481*.

Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Mutmainna, I., Hakim, L., & Saleh, D.

(2016). Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. *Jurnal Administrasi Publik*, 269–283. https://journal.unismuh.ac.id/ index. php/kolaborasi/article/view/883

Prihantara, A. (2023). Implementasi aplikasi "Pasar Online" sebagai upaya digitalisasi pasar tradisional (Studi kasus Pasar Minulyo Pacitan). Jurnal Proyeksi *Pendidikan Informatika, 3(1) :* 19.https://repository. stkippacitan. ac.id/id/eprint/1224.

Sagala, C. O., & Noerfitri. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Era Desentralisasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 115–126.

Saifudin, Habibi, M., & Tauhid, M. I. (2024). Strategi Pemberdayaan Pemuda melalui Pengembangan UMKM Berbasis Teknologi di Sidoarjo. *Kosiana: Jurnal Ekonomi Syariah,* 115–131.

Saputra, Y. H. (2018). Eksistensi dan transformasi petani gurem: Kasus pertanian wilayah pinggiran Kota Bandung. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 146–158.https://jurnal.uns.ac.id/sepa /article/view/25006/17650.

Sari, N. N., Hindaryatiningsih, N., & Basri, A. M. (2022). Peranan Unit Simpan Pinjam Kelompok Tani Wanita Bagi Pedagang Sayur. *Accounting: Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 74–83. https://doi.org/10.36709/jpa.v2i2.2.

Suharma, & Novita. (2017). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik,* 4(1), 45–56.

Zubaidi, A., & Giyarsih, S. R. (2019). Peran mahasiswa dalam program pemberdayaan masyarakat di kawasan tertinggal untuk penguatan ketahanan wilayah (*Tesis Magister).* Universitas Gadjah Mada. https://etd.repository.ugm.ac.id/penel itian/detail/179729